PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)

Saras Hikmatul M

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at SKPD Bandung. The phenomenon that is still going on Internal Supervision of the performance of local government is still weak internal controls that almost happened in selurush agencies both at the level of ministries, local governments, regional inspectorate and staff as well as the phenomenon of SAKD of local government performance is weakening SAKD affecting the performance of local governments DKI slumping. The purpose of this study is to determine the effect of the Internal Control and SAKD of local government performance Bandung.

This type of research consists of a descriptive study to illustrate the implementation of the Internal Control, SAKD and Local Government Performance. As well as verification research to prove the hypothesis in the research objectives by using test equipment PLS. The research unit is SKPD Bandung. The sampling technique using saturation sampling for total population and the same sample, namely on 34 SKPD with respondents consisting of two respondents, Head of Finance and Head. This research method is descriptive and explanatory.

Descriptively explained the internal control went very well, financial accounting systems area well and good government performance. In the verification showed that the internal control significant effect on the performance of local governments with high criteria and SAKD affect the performance of local governments.

Keywords: Internal Control, SAKD and Local Government Performance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuannya diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan yaitu otonomi. Dalam pembangunan otonomi, dibutukan suatu kinerja yang baik. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Rico Ales Sandra:2014).

Sejalan dengan kinerja yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, maka diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Yayah Handani: 2011).

Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya. Serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana (Wawan dan Lia:2009).

Adanya pengawasan internal yang memadai masih tetap diperlukan dalam organisasi atau instansi pemerintah. ini dikarenakan masalah yang timbul sangatlah kompleks sehingga tidak cukup hanya dengan diawasi dari luar namun perlu ditelusuri lebih mendalam bagaimana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya (Gede Pose Raharja:2015).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Intern terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris, guna memecahkan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai praktik pengawasan intern, sistem akuntansi keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Dapat meningkatan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan penulisan usulan penelitian yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengawasan Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 yang dikutip oleh Astri Kuswandari (2014) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Menurut Mulyadi (2001:163), ada empat tujuan sistem pengawasan intern, yaitu :

a) Menjaga Harta Organisasi
b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
c) Mendorong efisiensi
d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:42) dikutip oleh Yuliana Dwi Jayanti (2015) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

> "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi)".

Dari pengertian dapat dikatakan bahwa proses pokok dalam system akuntansi keuangan daerah ini adalah sebagai berikut:

1) Pengidentifikasian
2) Pengukuran
3) Pencatatan
4) Penggolongan
5) Pelaporan

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) dikutip Yuliana Dwi Jayanti (2015) kinerja pemerintah daerah adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (strategic planning) suatu organisasi.

Menurut Mardiasmo (2002:131), menjelaskan Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain, ekonomi adalah pabrik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less).

Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) menurut mardiamo (2002:131) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu . dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

Pengertian efisien menurut mardiamo (2002:132) berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrative) dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal) Mardiasmo (2002:132).

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Mardiasmo (2002:132).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut ihyaul ulum (2009:135) mengatakan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai.

Hal ini ditegaskan oleh jurnalnya Astri Kuswandari (2014) dapat dilihat bahwa Pengawasan Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, hal ini berarti pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh Pengawasan Intern yang dilaksanakan dengan baik.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2009:84) mengemukakan hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan keinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1) Pengawasan Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.
2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan metode penelitian yaitu Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan menurut Mashuri (2009:45) metode verifikatif adalah Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2011:38), mendefinisikan variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh pengawasan intern dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah”, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu:

1) Variabel independen (X1), yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah Pengawasan Intern.
2) Variabel independen (X2), yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3) Variabel Dependen (Y), yaitu variable tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variable-variabel lain. Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Kinerja Pemerintah daerah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library reserach). Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (Field Research)
   a) Wawancara (Interview) Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
   b) Kuesioner Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistic. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian.
2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitianpenelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 81), menyatakan bahwa pengertian sampel dapat dikatakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi

Sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung sebanyak 34 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Sub Bagian Keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah :

"Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realibitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1) Analisis Deskriptif
   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh SKPD Kota Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.
2) Analisis Verifikatif
   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.2.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode Partial Least Square (PLS) dijelaskan sebagai berikut:
"Model persamaan strukturan berbasis variance (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (variable manifest)".

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari yang dilakukan dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan jawaban kuesioner dari responden yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu pengaruh pengawasan intern dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

   Data penelitian untuk semua variabel dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Sebelum menguji pengaruh antar variabel terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Pengujian validitas menggunakan nilai korelasi skor item dengan skor total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan Pearson Correlation. Validitas digunakan untuk membuktikan kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (validity).

   Butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai pearson correlation nya lebih dari nilai rtabel dalam penelitian ini nilai rtabel adalah 0.254 (Signifikansi 5% & 61 responden). Hasil uji validitas menunjukkan semua item memiliki nilai nilai pearson correlation > 0,254 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel Pengawasan Intern (X1), SAKD (X2) dan item pernyataan Variabel Kinerja Pemrintah Daerah (Y) adalah valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

   Setelah pengujian validitas untuk masing masing butir pernyataan kuesioner dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menguji apakah kuesioner telah mengukur dengan cermat dan tepat apa yang hendak diukur. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach's dimana kuesioner dinyatakan reliable apabila hasil output perhitungan Alpha Cronbach's nya lebih dari nilai rtabel yaitu 0.254 (signifikansi 5%, responden 61).

4.1.2 Analisis Deskriptif Pengawasan Intern

Pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk menentukan standar pengawasan, mengukur hasil pekerjaan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.Yang menjadi indikator untuk Pengawasan Intern pada penelitian ini adalah Menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efisiensi, Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.Rata-rata skor untuk penilaian responden terhadap 4 indikator variabel Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

No. Angket	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Menjaga kekayaan Organisasi	236	295	80%	Baik
2	Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi	245	295	83%	Baik
3	Mendorong efisiensi	221	295	75%	Baik
4	Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen	231	295	78%	Baik
Total		933	1180	**79%**	**Baik**

4.1.3 Analisis Sistem akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.Yang menjadi indikator pada penelitian ini untuk variabel Sistem Akuntnsi Keuangan Daerah adalahnsebagai berikut:

1) Pengidentifikasian
2) Pengukuran
3) Pencatatan
4) Penggolongan
5) Pelaporan

Rata-rata skor untuk penilaian responden terhadap 5 indikator variabel Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
5	Pengidentifikasian	239	295	81	Baik
6	Pengukuran	234	295	79	Baik
7	Pencatatan	238	295	81	Baik
8	Penggolongan	236	295	80	Baik
9	Pelapopran	212	295	72	Baik
TOTAL		**1159**	**1475**	**78%**	**Baik**

4.1.4 Analisis Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan hasil dari pencapaian program/kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi yang sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Indikator yang digunakan dalam ariabel ini adalah Ekonomi, Efisiensi dan Efektifita.

Rata-rata skor penilaian responden untuk 4 indikator variabel Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
10	Ekonomi	212	295	72	Baik
11	Efisien	221	295	75	Baik
12	Efektifitas	219	295	74	Baik
TOTAL		**652**	**885**	**74%**	**Baik**

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif

Untuk menguji pengaruh dari Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka selanjutnya dilakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.2.4.

Dalam structural equation modeling ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (outer model) dan model structural (inner model). Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (exogenous latent variable) terhadap variabel laten dependen (endogenous latent variable).

4.1.6 Pengawasan Intern (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengawasan Intern diduga akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk membuktika kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho: γ1= 0, Pengawasan Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

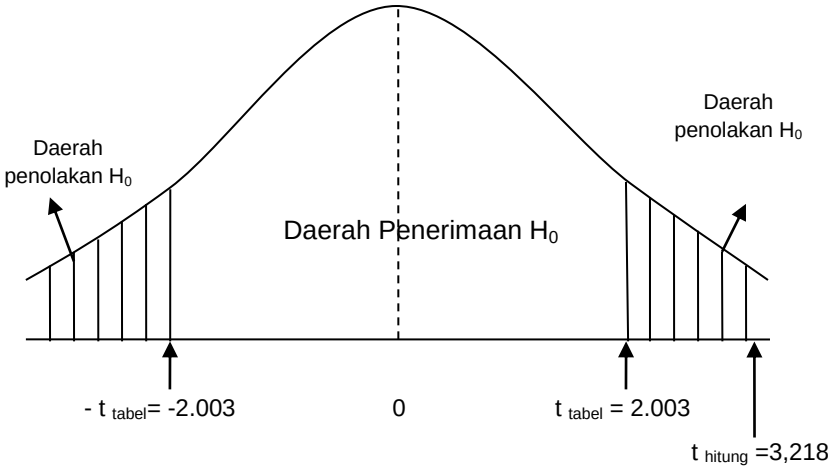
Ha: γ1≠ 0, Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Taraf signifikansi (□) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka ttabel adalah 2.003 (df=59-2-1=56).

Uji *t* Pengaruh Pengawasan Intern (X_1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_1>Y	0.439	3.128	2.003	$H_{0\ Ditolak}$	Signifikan

Pada tabel 4.25 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 3.128 > 2.003 (t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.8
Daerah Penerimaan Hipotesis X_1>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 3.002 berada didaerah penolakan Ho (t_{hitung}>t_{tabel}) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.1.7 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diduga akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk membuktika kesimpulan sementara itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho: γ2= 0, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

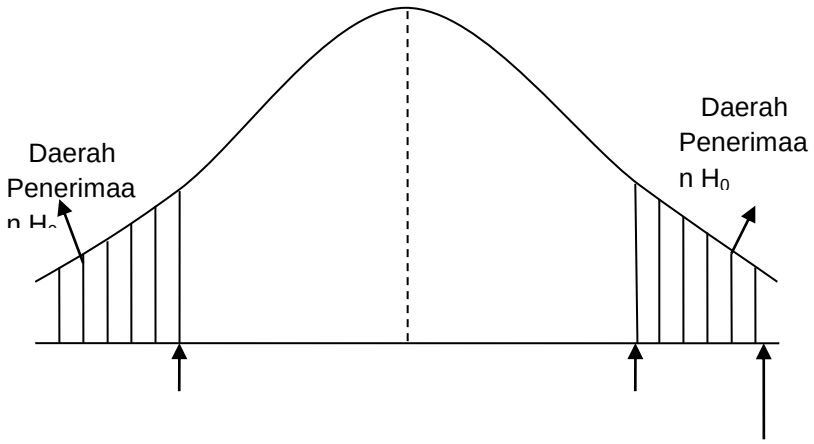
Ha: γ2≠ 0, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Taraf signifikansi (□) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%, maka ttabel adalah 2.003 (df=59-2-1=56).

Uji *t* Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X_2>Y	0.283	2.092	2.003	H_0 Ditolak	Signifikan

Pada tabel 4.25 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.173 > 2.003 (t_{tabel}). Berikut interpretasinya dalam gambar wilayah penerimaan dan penolakan hipotesis:



Gambar 4.9
Daerah Penerimaan Hipotesis X_2>Y

Pada gambar kurva pengujian hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} = 2.092 berada didaerah penolakan Ho ($t_{hitung}>t_{tabel}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengawasan Intern (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 28.3%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup yaitu sebesar 0.645 (0.40-0.69). thitung diperoleh sebesar 3.128, nilai ini lebih besar dari pada ttabel 2.003, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Pengawasan Intern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Bandung. Pengawasan Intern memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik Pengawasan Intern yang dilakukan maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Pengawaasan Intern belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Intern belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Pengawasan Intern.

4.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sistem Akntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 17%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup yaitu sebesar 0.603 (0.40-0.69). thitung diperoleh sebesar 2.092, nilai ini lebih besar dari pada ttabel 2.003, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Sistem Akuntansi Keangan Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Bandung. SAKD memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik Penerapan Sistem Akuntansi Keangan Daerah yang dilakukan maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap, sehingga dapat disimpulkan bahwa SAKD belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam SAKD.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup dengan arah hubungan yang positif. Pengawasan Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD di Kota Bandung dan memiliki arah hubungan yang positif/searah, artinya jika pengawasan intern dilakukan dengan baik maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula
2) Pengaruh Sistem Akntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup dengan arah hubungan yang positif. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD di Kota Bandung dan memiliki arah hubungan yang positif/searah, artinya jika penerapan Sistem Akntansi Keuangan Daerah dilakukan dengan baik maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Bandung maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Operasional
   a) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang lebih mendorong efisiensi atau tanggungjawab suatu aktivitas pengawasan, dan mencegah terjadinya penyelewengan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan di dorong kinerja instansi yang lebih baik lagi.

b) Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah khususnya mengenai pelaporan di setiap SKPD di kota Bandung harus lebih ditingkatkan kembali dan diperhatikan kebenaran untuk setiap pelaporan keuangannya sehingga pelaporan keuangan pada intsansi tersebut jelas dan terbukti kebenarannya.

2. Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti Sistem Pengendalian Intern dan sistem informasi akuntansi pada pemerintahan pusat atau daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Rohman. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah.* Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No. 1:21-32. (16 Februari 2011).

Agustinus Widanarto. 2012. *Pengaruh Pengawasan Internal Dan Pengawasan Eksternal Terhadap Kinerja Pemerintah.*

Almanda Primadona. 2013. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*

Askam Tuasikal 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku)* ISSN:1410-8623.

Astri Kuswandari. 2014. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Dinas Skpd Pemerintah Kota Bandung).*

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) (Departemen Keuangan RI, 2001). *Sistem akuntansi keuangan*.

Chabib Soleh. 2009. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung*: Fokus Media.

_____. 2010. *Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan Keuangan Daerah*.

Eko Hariyanto. 2005. *Peranan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance.*

Gede Pose Raharja. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Organisasi (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng).* e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah.* Yogyakarta: Unit Penerbitdan Percetakan (UPP) AMP YPKN. _____. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Theresia.2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi kedua.Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hidayat, Rahmad. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* Padang.

Ihyaul, Ulum. 2004. *Akuntasi sektor publik*: Suatu Pengatar. Jakarta: Bumi Aksara.

Iman Pirman Hidayat 2008. *Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD*. ISSN :1907-9958.

Irvan Saefulloh 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang.*

LAN & BPKP. 2000. *Indikator Prinsip Akuntabilitas.*

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: PenerbitAndi.

_____. 2009. *Akuntabilitas*. Yogyakarta.

Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

_____. Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Paulus Silalahi, Sem. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai).* Jurnal Ekonomi Volume 20, Nomor 3 September 2012.

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Rico, dkk. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Penerapan Good Goverment Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kabupaten Indragiri Hulu).*

Sandra, Rico Ales. 2014. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Penerapan Good Government Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kabupaten Indragiri Hulu).* JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.

Sarah K, Izmavita. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat).*

Silalahi, Sem Paulus. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai).* Jurnal Ekonomi Volume 20, Nomor 3 September 2012

Sukma, Wawan., dkk. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009 ISSN : 1907 – 9958

Umar Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

_____. No.33 Tahun 2004 *Tentang Sumber-Sumber Keuangan Daerah.*

Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia* untuk Perusahaan.Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.ISSN:1907-9958.